

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk adalah fenomena global, yang mana semakin banyak populasi yang menua menjadi hal yang wajar di berbagai negara. Di seluruh dunia, terdapat peningkatan dalam jumlah dan proporsi lansia. Saat ini, jumlah lansia di dunia telah mencapai 703 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050. Indonesia saat ini juga sedang menghadapi proses penuaan penduduk, dengan persentase lansia yang meningkat dari 7,56 persen pada tahun 2010 menjadi 9,7 persen pada tahun 2019, dan diprediksi akan mencapai 15,77 persen pada tahun 2035 (Sugito, 2022 hlm. 6-7).

Dalam tiga dekade terakhir, Peralihan beban penyakit kini lebih condong dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Pergeseran ini terlihat dari adanya perubahan yang penyebab utamanya hilangnya *Disability Adjusted Life Years (DALYs)*. Pada tahun 1990, penyebab utama hilangnya DALYs adalah gangguan neonatal, infeksi saluran pernapasan bawah, penyakit diare, tuberkulosis, dan stroke. Perubahan ini merupakan fenomena umum di banyak negara berkembang, yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi masyarakat yang kemudian mengarah kepada perubahan gaya hidup. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Bab I Poin ketiga yang mana pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, yang dijelaskan bahwa faktor risiko penyakit tidak menular umumnya dibagi menjadi tiga kelompok: faktor risiko perilaku, faktor risiko metabolik, dan faktor risiko lingkungan.

Dengan meningkatnya jumlah lansia di masyarakat, terutama sebagai dampak dari penambahan jumlah populasi lanjut usia, ditemui tantangan signifikan terkait kesehatan dan kesejahteraan mereka. Saat ini masih banyak lansia mengalami keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan yang diperlukan, serta memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai cara menjaga kesehatan mereka secara optimal. Lansia seringkali menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks. Ini bisa mempengaruhi lansia, baik secara positif

maupun negatif. Pertumbuhan dan perkembangan pada orang dewasa yang lebih tua akan terus berlanjut. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan dalam tubuh yang disebut sebagai proses penuaan pada setiap individu (Sari, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, tentunya perlu ada perhatian khusus dalam membantu lansia dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kesehatan para lansia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 3 yang berbunyi bahwa *“Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia”*. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 67 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan sebagai berikut: *“setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat”*. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah layanan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan (*promotif*), serta mencegah penyakit (*preventif*) di dalam sebuah kelompok atau komunitas.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada pasal 41 ayat 3 yang berbunyi *“Upaya kesehatan tingkat pertama diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, praktik dokter, klinik, praktikbidan, praktik asuhan keperawatan, pelayanan kesehatan tradisional, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Wahana Pelayanan Kesehatan Dasar, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)”*. Pemerintah kota bersama masyarakat turut andil dalam bertanggung jawab dalam melakukan edukasi, informasi, dan komunikasi yang sesuai tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh aspek

kehidupan. Program Pos Pembinaan Terpadu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani masalah ini. Dan untuk memahami dinamika program ini, kader yang berperan sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan lansia dengan berbagai layanan kesehatan melalui program pemberdayaan lansia yang salah satunya ialah Pos Pembinaan Terpadu.

Menurut Julian Rappaport dalam (Maspaitella, 2019) menjelaskan mengenai teori pemberdayaan komunitas yang menggambarkan mengenai bagaimana komunitas dapat diberdayakan melalui proses partisipasi aktif, peningkatan kapasitas, dan pengembangan sumber daya.

Pendidikan masyarakat hadir sebagai proses dinamis yang memungkinkan masyarakat lansia dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan hidup masyarakat. Argumen tersebut lahir dari pentingnya peran pendidikan masyarakat dalam memberikan pemahaman dan fasilitasi terhadap masyarakat. Sebagai hasilnya dapat melihat dari program dan layanan yang sudah dikembangkan, yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan masyarakat lansia melalui pemberdayaan kesehatan lansia dengan program pembinaan terpadu lansia. Dalam upaya memberdayakan kesehatan lansia, pendekatan terpadu melalui program Pos Pembinaan Terpadu menjadi relevan untuk memastikan penanganan yang holistik, mencakup berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan (Sudiapermana, E. 2021, hlm. 50-51).

Pemberdayaan lansia pada Pos Pembinaan Terpadu tidak hanya melibatkan pemberian layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Kader, sebagai perpanjangan tangan masyarakat, dapat membentuk hubungan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Lansia seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan dan layanan.

Ralph Linton berpendapat mengenai teori peran yaitu bahwasanya peran merepresentasikan aspek dinamis dari suatu status. Saat individu melaksanakan hak dan tanggung jawab yang sejalan dengan posisinya, ia tengah menjalankan perannya. Oleh karena itu, peran dan status tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain (Syamsir, 2019).

Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu PTM. Pos dijelaskan bahwa Pos Pembinaan Terpadu PTM merupakan tempat pelayanan terpadu bagi usia lanjut yang berbasis masyarakat dan disepakati di suatu lokasi tertentu di mana mereka dapat menerima pelayanan kesehatan. Data terkait sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti data rumah sakit, Puskesmas, Profil Kesehatan Daerah, Riskesdas, atau hasil survei lainnya. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh kader sebagai fasilitator program untuk melakukan advokasi, guna memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan, yang kemudian menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan di Pos Pembinaan Terpadu.

Dengan meningkatnya populasi lansia yang perlu menjadi perhatian khusus tentunya dibutuhkan banyak program pemberdayaan yang dapat mendukung mereka untuk mencapai kesejahteraan salah satunya ialah dengan adanya program pos pembinaan terpadu lansia ini. Kader kesehatan merupakan ujung tombak mengenai pelaksanaan program pemberdayaan lansia ini, sehingga pemahaman mengenai peran dan tantangan yang mereka hadapi sangat penting untuk dapat meningkatkan efektivitas program dan keberlanjutan program (Aslam, 2019).

Saat ini, sudah banyak lahir Pos Pembinaan Terpadu di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data tahun 2020, total jumlah Pos Pembinaan Terpadu mencapai 8.528 unit, naik 10,95 % dari tahun sebelumnya. Pos Pembinaan Terpadu sendiri lahir dari gagasan masyarakat setempat dengan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait. Meskipun pemerintah telah memperhatikan mengenai undang-undang pada lansia terkhusus dalam program pemberdayaan di Pos Pembinaan Terpadu, di kota Bogor masih kurang diperhatikan.

Permasalahan hadir mengenai aksesibilitas penguatan kader dari dinas terkait dalam memberikan pengetahuan dan wawasan terbaru mengenai perkembangan kesehatan yang belum merata, sumber daya manusia untuk menjadi bagian dari kader Pos Pembinaan Terpadu masih kurang, minimnya dukungan dari pemerintah mengenai pengadaan fasilitas kesehatan berupa alat

kesehatan, kursi, meja dan tempat. Hal tersebut, yang menjadi salah satu tantangan tersendiri pada kader, karena dapat menjadi faktor penghambat dalam proses fasilitasi pemberdayaan lansia yang akan dilakukan dalam program. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial menjadi permasalahan yang dihadapi oleh lansia. Dengan meningkatnya populasi lansia yang perlu menjadi perhatian khusus tentunya dibutuhkan banyak program pemberdayaan yang dapat mendukung mereka untuk mencapai kesejahteraan salah satunya ialah dengan adanya program pos pembinaan terpadu lansia ini. Kader kesehatan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program pemberdayaan lansia, sehingga pemahaman mengenai peran dan tantangan yang mereka hadapi sangat penting untuk dapat meningkatkan efektivitas program dan keberlanjutan program. Kualitas perhatian dari pemerintah serta lembaga yang rendah tentu akan melahirkan sebuah masalah, karena pada dasarnya pemerintah bertugas untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Akan tetapi, terdapat salah satu Pos Pembinaan Terpadu di Kota Bogor yang menunjukkan banyak lansia yang secara aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan lansia tersebut. Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan mengenai informasi melalui wawancara dengan ketua Pos Pembinaan Terpadu dan dilengkapi oleh dokumen dari buku kunjungan, peneliti memperoleh informasi bahwa dari bulan ke bulan secara terperiodik sesuai dengan jadwal pelaksanaan program, angka kunjungan lansia semakin meningkat dan menjangkau aksesnya terhadap semua lansia. Walaupun program ini tidak ditujukan khusus kepada lansia, namun lansia di wilayah Rw 03 Kelurahan Situ Gede sangat antusias sekali terhadap program tersebut. Hal tersebut mengapa terjadi demikian, karena kader kesehatan dalam Pos Pembinaan Terpadu Flamboyan memiliki dukungan emosional yang tinggi untuk membantu para lansia dalam mensejahterakan mereka, baik dalam kegiatan pengecekan kesehatan di Posbindu, kegiatan sosial lainnya, dan bahkan sampai kepada kunjungan rumah apabila terdapat lansia yang tidak dapat mengakses ke tempat pelaksanaan program Posbindu berlangsung. Menjadi Pos Pembinaan Terpadu paling aktif dari beberapa Pos Pembinaan Terpadu yang berada di wilayah

Andres Rama Ananda, 2024

Peran Kader Sebagai Fasilitator Dalam Program Pemberdayaan Lansia (Studi Kasus pada Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kelurahan Situ Gede yang dapat dilihat dari keaktifannya dalam mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh dinas terkait maupun tingkat kelurahan. Peran kader disini tidak hanya sebagai kader kesehatan saja, melainkan berperan sebagai kader multidimensional. Mengapa demikian, hal tersebut lahir karena para kader kesehatan di Posbindu Flamboyan memiliki beberapa peran penting yaitu sebagai berikut: edukator, motivator, fasilitasi, dan pendampingan. Dengan demikian, hal tersebut yang menjadikan kader tersorot dalam program ini, yang menarik perhatian dari para lansia untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan lansia ini.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, adapun Pos Pembinaan Terpadu yang dimaksud ialah Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan yang berada di wilayah Rw 03 Kelurahan Situ Gede yang menaungi masyarakat lansia yang berada di wilayah Rt 01 sampai Rt 04. Pos Pembinaan Terpadu ini sendiri lahir dari kepedulian para kader di wilayah setempat yang melihat bahwa kesehatan masyarakat khususnya pada lansia perlu menjadi perhatian khusus. Peran kader dalam mendukung aksesibilitas ini menjadi perhatian khusus dalam memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lansia secara menyeluruh dan kontinyu. Kader kesehatan di tingkat komunitas kesehatan dasar memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam memberdayakan para lansia. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhan para lansia, kader yang berperan sebagai fasilitator dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai program kesehatan. Hal ini dapat menjadikan kader lebih dominan tersorot dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para lansia.

Adapun hasil penelitian dari (Ratnasari, 2020) menyebutkan bahwa implementasi program belum optimal, Informasi yang diperlukan belum menyeluruh pada sasaran, tidak semua kader mendapatkan pelatihan, masih belum lengkapnya fasilitas, sumber pendanaan kurang, kurangnya komitmen dari pihak penyelenggara, SOP khusus program Pos Pembinaan Terpadu belum dibuat oleh Puskesmas. Selanjutnya oleh (Kusumah, 2020) menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan kesehatan lansia antara lain terdiri dari pengecekan kesehatan, senam lansia, serta sosialisasi kesehatan. Sedangkan

Andres Rama Ananda, 2024

Peran Kader Sebagai Fasilitator Dalam Program Pemberdayaan Lansia (Studi Kasus pada Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menurut (Nugraheni, 2018) Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pos Pembinaan Terpadu telah dikunjungi oleh para masyarakat mulai dari usia muda sampai tua. Kemudian, respon masyarakat belum menyambut baik dengan dilihat dari sebagian besar masih tidak hadir pada saat kegiatan berlangsung. Kapasitas sumber daya masih kurang, dan pendanaan program belum ditingkatkan secara optimal. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan program pemberdayaan lansia, belum banyak penelitian yang mencoba menjelajahi peran kader sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan lansia, masih terdapat ketidakpastian dan celah dalam literatur terkait sejauh mana peran ini memberikan dampak positif. Dalam penelitian ini, kemudian peneliti akan memfokuskan pada pelayanan yang diberikan oleh kader sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan lansia di Pos Pembinaan Terpadu. Berdasarkan latar belakang diatas, yang melandasi pentingnya penelitian yang berjudul “ *Peran Kader Sebagai Fasilitator Dalam Program Pemberdayaan Lansia (Studi Kasus Pada Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan Di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor* “ ini dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1.** Bagaimana kondisi objektif program pemberdayaan lansia di Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor ?
- 1.2.2.** Bagaimana langkah-langkah kader sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan lansia di Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor?
- 1.2.3.** Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan lansia di Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mengetahui kondisi objektif program pemberdayaan lansia di Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor.
- 1.3.2. Mengetahui langkah-langkah kader sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan lansia di Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor.
- 1.3.3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan lansia di Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam konteks peranan kader sebagai fasilitator dalam penggerak terdepan dalam memahami konsep pemberdayaan masyarakat. Khususnya dalam pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

1.4.2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu untuk pengembangan-pengembangan penelitian selanjutnya di dalam ranah pendidikan masyarakat terkhusus di dalam bidang konsentrasi pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Kader

Penelitian ini memberikan panduan praktis dan informasi yang dapat membantu kader sebagai fasilitator dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan lansia.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat membantu merekomendasikan terhadap pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan program pemberdayaan lansia salah satunya pada Pos Pembinaan Terpadu.

Andres Rama Ananda, 2024

Peran Kader Sebagai Fasilitator Dalam Program Pemberdayaan Lansia (Studi Kasus pada Pos Pembinaan Terpadu Lansia Flamboyan di Kelurahan Situ Gede Kota Bogor)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur penulisan skripsi mengacu kepada pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis), serta struktur organisasi skripsi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan konsep dan teori yang memiliki relevansi pada penelitian yang dilakukan dan sebagai landasan penelitian

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan saat melakukan penelitian, meliputi desain penelitian, informan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data,.

4. BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan temuan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan peneliti. Temuan dan pembahasan dideskripsikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. BAB V: PENUTUP

Pada bab penutup ini menguraikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti